



# PIN 2029: Stabilitas Kawasan Asia Tenggara

*Pada jangka pendek stabilitas kawasan akan aman dan soliditas ASEAN tidak mudah menjadi proxy dari kekuatan major power, terutama AS dan RRT.*

**CSIA.** Perkiraan Intelijen Nasional (PIN) 2029 merupakan sebuah studi mendalam yang fokus pada pemahaman lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara lima tahun ke depan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren dan dinamika yang akan membentuk lanskap geopolitik dan keamanan di kawasan tersebut. Analisis ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, dinamika internal negara-negara ASEAN, hingga perkembangan teknologi yang berdampak signifikan terhadap stabilitas regional. Sebagai contoh, meningkatnya penggunaan teknologi militer canggih, seperti drone dan sistem rudal canggih, dapat meningkatkan risiko konflik bersenjata di kawasan tersebut. Dinamika internal negara-negara ASEAN juga memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas regional, seperti perselisihan teritorial, konflik etnis, dan masalah keamanan non-tradisional seperti terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional.

# Ancaman dan Tantangan Eksternal

Lingkungan strategis Asia Tenggara hingga tahun 2029 diprediksi akan tetap diwarnai oleh berbagai ancaman dan tantangan yang berasal dari kekuatan eksternal. Konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan salah satu ancaman utama. Pertarungan antara kedua negara adikuasa ini berpotensi memanas dan berujung pada konfrontasi terbuka di wilayah Laut China Selatan (LCS), yang berpotensi mengancam hak Indonesia sebagai coastal state dalam mengelola kedaulatan maritimnya.

Pertumbuhan kekuatan militer RRT dan ambisinya untuk menguasai LCS menjadi sumber ketegangan dan ketidakpastian. RRT mengklaim hampir seluruh wilayah LCS, termasuk wilayah perairan yang diklaim oleh negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Selain itu, RRT juga menggunakan strategi diplomasi dan ekonomi untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan, termasuk dengan membangun infrastruktur dan memberikan bantuan kepada negara-negara ASEAN. Hal ini dapat mengundang kekhawatiran bagi negara-negara ASEAN yang merasa terancam oleh ambisi RRT.

AS juga terus meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Asia Tenggara, dengan tujuan untuk mengekang pengaruh RRT. Peningkatan kehadiran militer AS di wilayah ini berpotensi menimbulkan gesekan dan persaingan dengan RRT, sehingga meningkatkan risiko konfrontasi militer di kawasan tersebut. AS juga berupaya untuk memperkuat aliansi militernya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti dengan Filipina, Thailand, dan Singapura. Hal ini dapat meningkatkan ketegangan dan ketidakpastian di kawasan Asia Tenggara.

Selain konflik geopolitik antara AS dan RRT, Asia Tenggara juga menghadapi ancaman dari kelompok teroris dan ekstremis. Kelompok-kelompok ini dapat memanfaatkan ketidakstabilan di kawasan untuk melancarkan serangan dan menyebarkan ideologi ekstremis. Peningkatan kejahatan transnasional, seperti penyelundupan narkoba dan senjata, juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan di kawasan. Ancaman-ancaman ini memerlukan koordinasi dan kerjasama yang erat antara negara-negara ASEAN dalam rangka mengatasi tantangan keamanan yang kompleks.

Asia Tenggara juga menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan ekonominya. Perubahan iklim, bencana alam, dan krisis ekonomi global dapat berdampak negatif pada perekonomian negara-negara ASEAN. Selain itu, persaingan ekonomi antar negara-negara di kawasan juga dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Untuk menghadapi tantangan ini, negara-negara ASEAN perlu memperkuat integrasi ekonomi regional, meningkatkan kerjasama ekonomi, dan membangun ketahanan ekonomi.

# Stabilitas Kawasan Asia Tenggara

Stabilitas Kawasan Asia Tenggara merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan regional. Akan tetapi, stabilitas ini menghadapi berbagai ancaman yang berasal dari dalam dan luar kawasan. Ancaman eksternal yang paling menonjol adalah persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dapat mengundang kekhawatiran bagi negara-negara ASEAN yang merasa terancam oleh ambisi RRT.

Persaingan ini berisiko memicu konfrontasi terbuka di Laut China Selatan, yang dapat mengancam hak-hak negara pantai, termasuk Indonesia. Hal ini semakin diperparah oleh kebijakan "Indo-Pasifik" yang dipromosikan oleh Amerika Serikat dan upaya RRT untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan. AS juga terus meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Asia Tenggara, dengan tujuan untuk mengekang pengaruh RRT. Peningkatan kehadiran militer AS di wilayah ini berpotensi menimbulkan gesekan dan persaingan dengan RRT, sehingga meningkatkan risiko konfrontasi militer di kawasan tersebut. AS juga berupaya untuk memperkuat aliansi militernya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti dengan Filipina, Thailand, dan Singapura. Hal ini dapat meningkatkan ketegangan dan ketidakpastian di kawasan Asia Tenggara.

Selain konflik geopolitik antara AS dan RRT, Asia Tenggara juga menghadapi ancaman dari kelompok teroris dan ekstremis. Kelompok-kelompok ini dapat memanfaatkan ketidakstabilan di kawasan untuk melancarkan serangan dan menyebarkan ideologi ekstremis. Peningkatan kejahatan transnasional, seperti penyelundupan narkoba dan senjata, juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan di kawasan. Ancaman-ancaman ini memerlukan koordinasi dan kerjasama yang erat antara negara-negara ASEAN dalam rangka mengatasi tantangan keamanan yang kompleks.

Asia Tenggara juga menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan ekonominya. Perubahan iklim, bencana alam, dan krisis ekonomi global dapat berdampak negatif pada perekonomian negara-negara ASEAN. Selain itu, persaingan ekonomi antar negara-negara di kawasan juga dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Untuk menghadapi tantangan ini, negara-negara ASEAN perlu memperkuat integrasi ekonomi regional, meningkatkan kerjasama ekonomi, dan membangun ketahanan ekonomi.

Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Indonesia dapat memainkan peran sebagai jembatan dialog antara negara-negara besar dan mendorong kolaborasi regional untuk mengatasi tantangan bersama. Peningkatan stabilitas di kawasan Asia Tenggara membutuhkan komitmen yang kuat dari semua negara anggota ASEAN. Diplomasi dan dialog perlu ditingkatkan untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan di antara negara-negara di kawasan.

# Soliditas ASEAN

Soliditas ASEAN merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Namun, berbagai tantangan internal dan eksternal dapat mengancam soliditas ASEAN. Tantangan internal meliputi perbedaan kepentingan nasional antar negara anggota, seperti perbedaan pandangan mengenai isu Laut China Selatan. Di sini, negara-negara seperti Vietnam dan Filipina memiliki kepentingan yang berbeda dengan negara-negara seperti Kamboja dan Laos, yang mungkin lebih berhati-hati dalam menentang China. Selain itu, isu-isu sensitif seperti konflik maritim dan perdagangan manusia dapat memicu perselisihan antara negara-negara anggota ASEAN.

Di sisi eksternal, persaingan geopolitik antara AS dan RRT dapat memicu tekanan terhadap ASEAN untuk mengambil posisi. ASEAN dituntut untuk menjaga netralitas dan menghindari keterlibatan dalam konflik antar kekuatan besar. Terutama dalam konteks Laut China Selatan, ASEAN dihadapkan pada tekanan dari kedua belah pihak untuk memilih sisi. AS mendorong ASEAN untuk mendukung kebebasan navigasi dan hak-hak maritim internasional, sementara RRT menekan ASEAN untuk menerima klaim wilayahnya di Laut China Selatan. Hal ini dapat menciptakan perpecahan dalam ASEAN dan menghambat upaya untuk mencapai konsensus dalam kebijakan regional.

Selain itu, ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme, perdagangan manusia, dan perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi soliditas ASEAN. Kelompok-kelompok teroris seperti ISIS dan Jemaah Islamiyah dapat memanfaatkan ketidakstabilan di kawasan untuk melancarkan serangan dan menyebarkan ideologi ekstremis. Peningkatan kejahatan transnasional, seperti penyelundupan narkoba dan senjata, juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan di kawasan. Perubahan iklim dapat memicu bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial serta menghambat pembangunan di kawasan. Menanggapi ancaman-ancaman ini, ASEAN membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang erat antara negara-negara anggota untuk menghadapi tantangan keamanan yang kompleks.

Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, ASEAN perlu memperkuat internal dan menjaga konsensus. Peningkatan dialog dan kerja sama antar negara anggota sangat penting dalam mengatasi perbedaan kepentingan. ASEAN juga perlu mengembangkan mekanisme yang lebih efektif untuk menangani isu-isu sensitif seperti konflik maritim, termasuk melalui dialog dan mekanisme penyelesaian sengketa damai.

Selain itu, ASEAN perlu meningkatkan kerja sama dengan mitra internasional untuk menghadapi ancaman keamanan non-tradisional. ASEAN juga harus menjaga netralitas dan menghindari keterlibatan dalam persaingan geopolitik antara AS dan RRT. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan menghindari eskalasi konflik. ASEAN dapat memainkan peran sebagai mediator dan promotor dialog antara AS dan RRT untuk mencegah konflik terbuka di Laut China Selatan dan menjaga stabilitas kawasan.

# Proxy Kekuatan Major Power

Dalam konteks geopolitik global yang semakin kompleks, Asia Tenggara menjadi medan perebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan major power, terutama Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Stabilitas kawasan dan soliditas ASEAN rentan menjadi alat (proxy) bagi kedua negara untuk memproyeksikan kekuatan dan mencapai tujuan strategis mereka. AS dan RRT berupaya untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di Asia Tenggara melalui berbagai strategi, termasuk diplomasi, ekonomi, dan militer.

AS, dengan doktrin Indo-Pacific yang diusungnya, berusaha untuk menjaga stabilitas kawasan dan melawan pengaruh RRT yang terus meluas. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kerja sama militer dengan negara-negara di Asia Tenggara, seperti program latihan bersama dan penjualan senjata. Contohnya, AS telah meningkatkan latihan militer bersama dengan Indonesia, Filipina, dan Vietnam. AS juga mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas di kawasan sebagai bentuk kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Program "Indo-Pacific Economic Framework" merupakan salah satu contoh konkret dari upaya AS untuk mempromosikan konektivitas ekonomi dan memperkuat pengaruhnya di kawasan.

Di sisi lain, RRT juga berupaya untuk memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara melalui Belt and Road Initiative (BRI), sebuah program investasi infrastruktur yang mencakup berbagai negara di Asia, termasuk negara-negara ASEAN. RRT juga menawarkan pinjaman dan bantuan ekonomi kepada negara-negara di Asia Tenggara sebagai bentuk dukungan bagi pembangunan mereka. Contohnya, RRT telah memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur di Kamboja, Laos, dan Myanmar. Selain itu, RRT juga meningkatkan kehadiran militernya di Laut China Selatan (LCS), yang menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara di kawasan. Peningkatan aktivitas militer RRT di LCS, seperti pembangunan pulau-pulau buatan dan penempatan peralatan militer, telah memicu ketegangan dengan negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia.

Perseteruan antara AS dan RRT di Asia Tenggara dapat mengancam stabilitas kawasan. Negara-negara ASEAN berada dalam posisi yang sulit, di antara dua kekuatan besar yang saling bersaing. Mereka harus berhati-hati dalam mengambil sikap dan menghindari keterlibatan dalam konflik antara kedua negara. Negara-negara ASEAN perlu menjaga netralitas dan mempertahankan prinsip-prinsip ASEAN, seperti non-intervensi dan penyelesaian sengketa secara damai. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan mencegah konflik terbuka di Laut China Selatan. ASEAN dapat memainkan peran sebagai mediator dan promotor dialog antara AS dan RRT untuk mencegah konflik terbuka di Laut China Selatan dan menjaga stabilitas kawasan.

# Pertarungan Geopolitik AS-RRT

Pertarungan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan salah satu faktor eksternal yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara. Kedua negara superpower ini memiliki kepentingan strategis yang saling bersinggungan di kawasan ini, terutama dalam hal ekonomi, politik, dan militer. AS berupaya mempertahankan dominasinya di Asia Tenggara melalui aliansi militer dan hubungan diplomatik yang kuat, sementara RRT berusaha memperluas pengaruhnya dengan memanfaatkan kekuatan ekonominya dan meningkatkan kehadiran militernya di Laut China Selatan.

AS telah lama menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara, dengan aliansi militer yang kuat dengan negara-negara seperti Thailand, Filipina, dan Singapura. AS juga memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan negara-negara ASEAN, dan telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan. AS juga telah memberikan bantuan militer kepada negara-negara di Asia Tenggara, seperti program "Indo-Pacific Economic Framework" yang merupakan salah satu contoh konkret dari upaya AS untuk mempromosikan konektivitas ekonomi dan memperkuat pengaruhnya di kawasan.

Di sisi lain, RRT juga berupaya untuk memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara melalui Belt and Road Initiative (BRI), sebuah program investasi infrastruktur yang mencakup berbagai negara di Asia, termasuk negara-negara ASEAN. RRT juga menawarkan pinjaman dan bantuan ekonomi kepada negara-negara di Asia Tenggara sebagai bentuk dukungan bagi pembangunan mereka. Contohnya, RRT telah memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur di Kamboja, Laos, dan Myanmar. Selain itu, RRT juga meningkatkan kehadiran militernya di Laut China Selatan (LCS), yang menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara di kawasan. Peningkatan aktivitas militer RRT di LCS, seperti pembangunan pulau-pulau buatan dan penempatan peralatan militer, telah memicu ketegangan dengan negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia.

Perseteruan antara AS dan RRT di Asia Tenggara dapat mengancam stabilitas kawasan. Negara-negara ASEAN berada dalam posisi yang sulit, di antara dua kekuatan besar yang saling bersaing. Mereka harus berhati-hati dalam mengambil sikap dan menghindari keterlibatan dalam konflik antara kedua negara. Negara-negara ASEAN perlu menjaga netralitas dan mempertahankan prinsip-prinsip ASEAN, seperti non-intervensi dan penyelesaian sengketa secara damai. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan mencegah konflik terbuka di Laut China Selatan. ASEAN dapat memainkan peran sebagai mediator dan promotor dialog antara AS dan RRT untuk mencegah konflik terbuka di Laut China Selatan dan menjaga stabilitas kawasan.

# Risiko Konfrontasi Terbuka di Laut China Selatan

Pertarungan geopolitik antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut China Selatan (LCS) memiliki potensi untuk memicu konfrontasi terbuka yang berbahaya. Meskipun kedua kekuatan besar telah berusaha untuk menghindari konflik langsung, peningkatan aktivitas militer dan klaim teritorial yang tumpang tindih telah meningkatkan risiko pertempuran yang tidak disengaja atau bahkan yang disengaja. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Indonesia, yang memiliki hak sebagai negara pesisir di LCS.

Salah satu faktor yang meningkatkan risiko konfrontasi terbuka adalah kehadiran kapal-kapal perang dan pesawat tempur dari kedua belah pihak di LCS. AS secara rutin mengirimkan kapal-kapal perang dan pesawat terbang untuk operasi kebebasan navigasi di wilayah yang diklaim oleh RRT. AS, melalui program "Indo-Pacific Economic Framework", berupaya untuk mempromosikan konektivitas ekonomi dan memperkuat pengaruhnya di kawasan, termasuk di LCS.

RRT, pada gilirannya, telah meningkatkan kehadiran militernya di LCS, termasuk pembangunan pulau-pulau buatan dan instalasi militer di wilayah yang disengketakan. RRT juga berupaya untuk memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara melalui Belt and Road Initiative (BRI), sebuah program investasi infrastruktur yang mencakup berbagai negara di Asia, termasuk negara-negara ASEAN. RRT juga menawarkan pinjaman dan bantuan ekonomi kepada negara-negara di Asia Tenggara sebagai bentuk dukungan bagi pembangunan mereka. Contohnya, RRT telah memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur di Kamboja, Laos, dan Myanmar. Peningkatan aktivitas militer RRT di LCS, seperti pembangunan pulau-pulau buatan dan penempatan peralatan militer, telah memicu ketegangan dengan negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia.

Selain itu, sengketa teritorial di LCS telah menjadi sumber ketegangan yang terus-menerus. RRT mengklaim hampir seluruh LCS, sementara negara-negara tetangga, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia, juga memiliki klaim atas wilayah tersebut. Sengketa ini telah menyebabkan insiden-insiden maritim yang berbahaya, termasuk tabrakan kapal dan sengketa penangkapan ikan. Indonesia sendiri memiliki klaim atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di LCS dan perlu mengamankan hak-haknya sebagai negara pesisir.

Jika konfrontasi terbuka terjadi di LCS, konsekuensinya bisa sangat besar. Pertempuran antara AS dan RRT dapat menyebabkan kerugian besar dalam nyawa dan kerusakan properti. Konflik tersebut juga dapat mengacaukan perdagangan global dan menyebabkan ketidakstabilan regional yang luas. Hal ini akan berdampak buruk bagi Indonesia yang merupakan negara maritim dan memiliki kepentingan strategis di LCS. Oleh karena itu, penting bagi kedua kekuatan besar untuk mencari penyelesaian damai atas sengketa mereka di LCS dan menghindari eskalasi konflik.

# Ancaman terhadap Hak Indonesia sebagai Coastal State

Dalam konteks persaingan geopolitik di Laut China Selatan, hak-hak Indonesia sebagai negara pantai (coastal state) menghadapi ancaman serius yang berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas kawasan. Peningkatan aktivitas militer dan klaim teritorial oleh beberapa negara di wilayah tersebut, terutama China, dapat menghambat kebebasan navigasi, eksplorasi sumber daya laut, dan penegakan hukum maritim Indonesia. Hal ini berpotensi mengancam kedaulatan maritim dan hak-hak ekonomi Indonesia, yang dapat berdampak buruk bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Indonesia memiliki hak-hak laut yang diakui secara internasional berdasarkan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Hak-hak tersebut meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, yang memberikan Indonesia hak-hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Namun, dengan adanya klaim teritorial overlapping yang meluas dari China, hak-hak tersebut menjadi terancam. China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, yang bertentangan dengan klaim Indonesia atas ZEE dan landas kontinen di wilayah tersebut. Klaim teritorial yang tumpang tindih ini memicu sengketa maritim dan meningkatkan risiko konfrontasi terbuka.

Aktivitas militer China di Laut China Selatan, seperti pembangunan pulau-pulau buatan dan penempatan peralatan militer, dapat mengancam keamanan dan stabilitas maritim Indonesia. China telah melakukan patroli kapal perang dan latihan militer di wilayah yang diklaim oleh Indonesia, yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik dan pelanggaran hak-hak maritim Indonesia. Selain itu, aktivitas penangkapan ikan ilegal dan eksplorasi minyak dan gas di wilayah ZEE Indonesia oleh kapal-kapal China juga mengancam kedaulatan maritim dan hak-hak ekonomi Indonesia.

## Pentingnya Penegakan Hukum dan Diplomasi

Untuk menghadapi ancaman ini, Indonesia perlu meningkatkan penegakan hukum maritim, diplomasi internasional, dan kerja sama regional dengan negara-negara ASEAN. Penegakan hukum yang tegas dan terkoordinasi penting untuk melindungi hak-hak maritim Indonesia dan mencegah pelanggaran oleh pihak asing. Indonesia perlu memperkuat kemampuan dan kapasitas armada maritimnya, serta meningkatkan pengawasan dan patroli di wilayah ZEE dan landas kontinennya untuk mencegah aktivitas ilegal dan menjaga kedaulatan maritim.

Indonesia juga perlu memperkuat diplomasi internasional dengan negara-negara terkait, termasuk China, untuk mencari solusi damai dan win-win dalam menyelesaikan sengketa maritim. Indonesia perlu terus menengahi dan mendorong dialog antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa, serta mencari mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan. Kerja sama regional melalui ASEAN penting untuk membangun konsensus dan mekanisme regional dalam pengelolaan Laut China Selatan. Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mendorong dialog dan kerja sama regional, serta membangun mekanisme bersama untuk menyelesaikan sengketa dan menjaga stabilitas maritim di wilayah tersebut.

# Pengelolaan Kedaulatan Maritim Indonesia

Pengelolaan kedaulatan maritim Indonesia merupakan isu strategis yang mendesak di tengah meningkatnya persaingan geopolitik dan ancaman keamanan non-tradisional di Laut China Selatan. Indonesia, sebagai coastal state, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga dan melindungi kedaulatan maritimnya, mengingat wilayah perairannya yang luas dan kaya akan sumber daya. Dalam konteks ini, terdapat berbagai ancaman eksternal yang perlu diatasi, seperti proxy kekuatan major power, konflik geopolitik AS-RRT, risiko konfrontasi terbuka di Laut China Selatan, dan ancaman terhadap hak-hak maritim Indonesia.

Aktivitas militer China di Laut China Selatan, seperti pembangunan pulau buatan dan penempatan peralatan militer, dapat mengancam keamanan dan stabilitas maritim Indonesia. China telah melakukan patroli kapal perang dan latihan militer di wilayah yang diklaim oleh Indonesia, yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik dan pelanggaran hak-hak maritim Indonesia. Aktivitas penangkapan ikan ilegal dan eksplorasi minyak dan gas di wilayah ZEE Indonesia oleh kapal-kapal China juga mengancam kedaulatan maritim dan hak-hak ekonomi Indonesia.

Menjawab tantangan tersebut, Indonesia memiliki sejumlah strategi untuk mengelola kedaulatan maritimnya, antara lain:

- Penguatan Kapasitas dan Kemampuan TNI AL
- Peningkatan Kerja Sama dengan Negara-negara Tetangga
- Diplomasi dan Negosiasi untuk Menyelesaikan Sengketa Maritim
- Pengembangan Ekonomi Maritim yang Berkelanjutan

Penguatan kapasitas dan kemampuan TNI AL menjadi prioritas utama dalam menjaga kedaulatan maritim. Hal ini meliputi modernisasi alutsista, pelatihan dan pendidikan personel, serta peningkatan patroli dan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Modernisasi alutsista TNI AL sangat penting untuk menghadapi ancaman militer dari negara-negara lain. Pelatihan dan pendidikan personel yang profesional dan terampil juga menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan maritim. Selain itu, peningkatan patroli dan pengawasan di wilayah perairan Indonesia diperlukan untuk mencegah aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan perdagangan manusia.

Kerja sama dengan negara-negara tetangga, khususnya di kawasan Asia Tenggara, juga penting untuk menciptakan stabilitas dan keamanan maritim. Indonesia aktif terlibat dalam forum-forum regional seperti ASEAN dan Indian Ocean Rim Association (IORA) untuk membahas isu-isu maritim dan meningkatkan kolaborasi. Kerja sama regional sangat penting untuk membangun konsensus dan mekanisme regional dalam pengelolaan Laut China Selatan. Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mendorong dialog dan kerja sama regional, serta membangun mekanisme bersama untuk menyelesaikan sengketa dan menjaga stabilitas maritim di wilayah tersebut.

Diplomasi dan negosiasi menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan sengketa maritim, khususnya di Laut China Selatan. Indonesia berupaya untuk membangun komunikasi dan dialog dengan negara-negara terkait untuk mencari solusi damai dan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum internasional. Indonesia perlu terus menengahi dan mendorong dialog antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa, serta mencari mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan merupakan salah satu cara untuk memperkuat kedaulatan maritim. Indonesia memiliki potensi maritim yang besar, seperti perikanan, pariwisata, dan energi laut. Pengembangan ekonomi maritim dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kontrol terhadap wilayah perairan Indonesia.

# Ancaman Keamanan Non-Tradisional

## Terorisme

Terorisme transnasional merupakan ancaman serius bagi keamanan di Asia Tenggara. Kelompok-kelompok teroris seperti ISIS dan Al-Qaeda telah mencoba melakukan serangan di beberapa negara di wilayah ini, seperti di Filipina Selatan. Mereka memanfaatkan konflik internal, ketidakstabilan politik, dan kemiskinan sebagai celah untuk merekrut anggota dan melakukan kegiatan teror mereka, seperti bom bunuh diri dan penculikan. Hal ini sangat memprihatinkan, karena dapat mengancam stabilitas kawasan dan mengganggu upaya kerja sama regional, seperti ASEAN.

## Bencana Alam

Asia Tenggara merupakan wilayah yang rawan bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan kekeringan. Bencana alam ini dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan korban jiwa. Risiko bencana alam semakin meningkat karena perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap bencana alam maritim, seperti tsunami dan gempa bumi. Kejadian ini dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda, dan menghambat pembangunan ekonomi maritim.

## Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, dan perdagangan senjata, merupakan ancaman yang semakin berkembang di Asia Tenggara. Kejahatan ini merugikan negara-negara di wilayah ini secara ekonomi dan sosial, serta mengancam stabilitas politik dan keamanan. Aktivitas ilegal ini dapat menghambat upaya membangun kedaulatan maritim dan ekonomi maritim, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

## Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan ancaman global yang memiliki dampak signifikan di Asia Tenggara. Meningkatnya suhu, naiknya permukaan air laut, dan frekuensi bencana alam merupakan dampak perubahan iklim yang mengancam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Hal ini dapat menyebabkan konflik sumber daya, pengungsian, dan ketegangan sosial. Dampak perubahan iklim ini juga dapat menghambat upaya Indonesia untuk memperkuat kedaulatan dan ekonomi maritimnya.

# Permasalahan Internal Kawasan Asia Tenggara

Selain ancaman dan tantangan dari kekuatan eksternal, kawasan Asia Tenggara juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan internal yang kompleks dan dapat menghambat stabilitas dan kemajuan regional.

Beberapa isu internal yang menonjol meliputi:

- Ketimpangan ekonomi dan sosial antar negara anggota ASEAN: Perbedaan tingkat pendapatan dan perkembangan ekonomi antar negara anggota ASEAN, seperti antara Singapura dan Myanmar, dapat memicu ketegangan dan ketidakseimbangan dalam kerja sama regional. Selain itu, akses yang tidak merata terhadap sumber daya, pendidikan, dan layanan kesehatan juga menjadi faktor penyebab ketimpangan sosial.
- Konflik dan kekerasan antar kelompok etnis dan agama: Konflik etnis dan agama, seperti yang terjadi di Myanmar, Filipina selatan, dan Thailand selatan, dapat memicu ketidakstabilan dan kekerasan yang berdampak luas. Penting untuk membangun toleransi dan dialog antar kelompok untuk mencegah konflik yang berpotensi mengancam keamanan dan stabilitas kawasan.
- Korupsi dan pemerintahan yang tidak transparan di beberapa negara anggota: \*\* Korupsi dan pemerintahan yang tidak transparan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kemakmuran rakyat. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan kelembagaan negara dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial.
- Perubahan iklim dan bencana alam: Dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, banjir, kekeringan, dan badai, semakin mengancam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Asia Tenggara. Selain itu, bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami juga menjadi ancaman nyata bagi negara-negara kepulauan di wilayah ini. Kerjasama regional dalam penanggulangan bencana alam dan adaptasi terhadap perubahan iklim sangat penting untuk meminimalisir dampak buruknya.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat: Kecepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Asia Tenggara menghadirkan tantangan baru, seperti kejahatan siber, penyebaran hoaks, dan polarisasi opini publik. Penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mengatur ruang digital yang aman dan bertanggung jawab.

Permasalahan internal ini saling berkaitan dan dapat memperburuk situasi keamanan dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari negara anggota ASEAN untuk mengatasi isu-isu tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

# Isu Ekonomi, Sosial, dan Politik

1

## Pertumbuhan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi antar negara di Asia Tenggara masih menjadi tantangan utama. Negara-negara seperti Singapura dan Brunei Darussalam memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara seperti Kamboja dan Laos. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial dalam jangka panjang.

2

## Pertumbuhan Penduduk

Asia Tenggara memiliki populasi yang terus berkembang. Hal ini memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga menciptakan tekanan pada sumber daya alam, infrastruktur, dan layanan publik. Peningkatan populasi juga berpotensi meningkatkan kompetisi untuk sumber daya, pekerjaan, dan peluang pendidikan.

3

## Politik

Dinamika politik di Asia Tenggara kompleks. Tantangan seperti terorisme, radikalisme, dan konflik perbatasan masih menjadi isu sensitif di berbagai negara. Kestabilan politik menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

# Peran Indonesia sebagai Negara Poros

Dalam konteks dinamika geopolitik regional yang semakin kompleks, Indonesia memiliki peran strategis sebagai negara poros di Asia Tenggara. Posisi geografisnya yang strategis, serta komitmennya terhadap prinsip-prinsip non-blok dan dialog, menjadikan Indonesia sebagai jembatan penghubung antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan, seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Indonesia dapat berperan sebagai mediator dan promotor dialog dan kerja sama regional, sehingga dapat mencegah konflik dan menjaga stabilitas kawasan.

Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Asia Tenggara. Dengan populasi yang besar dan ekonomi yang terus berkembang, Indonesia dapat menjadi pasar yang menarik bagi negara-negara lain di kawasan, serta dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga dapat menjadi pusat pengetahuan dan teknologi bagi negara-negara berkembang di Asia Tenggara, sehingga dapat membantu dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengentasan masalah sosial.

Untuk mewujudkan peran strategis sebagai negara poros, Indonesia perlu memperkuat diplomasi dan kerja sama internasionalnya dengan negara-negara di kawasan dan dunia. Indonesia juga perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan keamanan. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang kuat, stabil, dan dapat diandalkan dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara.

# Strategi Penguatan Peran Indonesia

Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Asia Tenggara. Untuk memperkuat peran ini, diperlukan strategi yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek, mulai dari diplomasi hingga keamanan maritim.

- Meningkatkan diplomasi aktif: Indonesia perlu terus menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan dunia internasional. Diplomasi ini harus fokus pada isu-isu strategis seperti keamanan maritim, ekonomi, dan sosial budaya.
- Memperkuat kerja sama regional: Indonesia harus terus mendorong kerja sama antar negara ASEAN dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini penting untuk meningkatkan soliditas ASEAN dan memperkuat peran ASEAN di kancah internasional.
- Meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanan: Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanan nasional untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Peningkatan kapasitas ini harus mencakup modernisasi alutsista, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, dan pengembangan strategi pertahanan yang komprehensif.
- Memperkuat ekonomi nasional: Indonesia harus terus meningkatkan daya saing ekonomi nasional untuk menjadi negara yang lebih kuat dan mandiri. Hal ini dapat dilakukan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

# Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis strategis terhadap lingkungan strategis Asia Tenggara hingga tahun 2029, terdapat beberapa ancaman dan tantangan yang perlu diwaspadai, baik dari sumber eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, stabilitas kawasan dan soliditas ASEAN tidak mudah menjadi proxy dari kekuatan major power, terutama AS dan RRT.

Di sisi lain, permasalahan internal kawasan, seperti isu ekonomi, sosial, dan politik, juga menjadi tantangan tersendiri. Ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan konflik politik antar negara dapat mengancam stabilitas dan keamanan kawasan. Permasalahan ini perlu ditangani dengan serius untuk mencegah konflik yang dapat menghambat pembangunan dan kemajuan di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia, sebagai negara poros di Asia Tenggara, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Untuk memperkuat peran tersebut, Indonesia perlu menerapkan strategi yang komprehensif, meliputi penguatan diplomasi regional, peningkatan kerja sama keamanan maritim, dan pengembangan ekonomi yang inklusif. Indonesia dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar negara di kawasan, mendorong kerja sama antar negara ASEAN dalam berbagai bidang, dan menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Rekomendasi utama yang dapat dilakukan Indonesia adalah dengan memperkuat diplomasi regional untuk mendorong ASEAN sebagai organisasi regional yang solid dan independen. Indonesia dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembangunan dan kemajuan di kawasan. Penguatan diplomasi regional dapat dilakukan melalui peningkatan komunikasi antar negara ASEAN, pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, dan penguatan peran ASEAN dalam forum internasional.

Di sisi lain, Indonesia juga perlu meningkatkan kerja sama keamanan maritim dengan negara-negara di kawasan, termasuk dengan negara-negara besar, untuk mencegah konfrontasi terbuka di Laut China Selatan. Kerja sama keamanan maritim ini dapat dilakukan melalui patroli bersama, latihan militer bersama, dan pengembangan mekanisme koordinasi yang efektif. Selain itu, Indonesia perlu mendorong pengembangan ekonomi yang inklusif di kawasan, yang dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di kawasan.